



LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN
(LPPKal)
KALURAHAN CATURHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

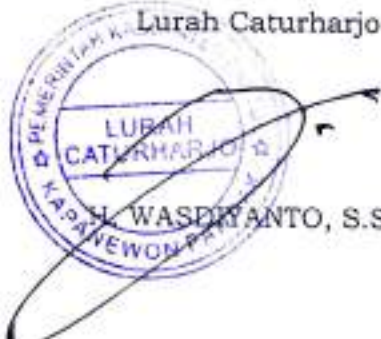
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LPPKal) Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LPPKal) Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul tahun 2023, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan rencana kegiatan tindak lanjut bagi Kalurahan Caturharjo khususnya dan pada umumnya sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menentukan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LPPKal) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 baik bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non fisik.

Kamipun menyadari bahwa dalam prakteknya banyak kendala tidak sesuai target yang ditentukan dalam RPJMKal dan RPKKal, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak sehingga kami membutuhkan koreksi, arahan dan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait. Juga untuk tahun berikutnya kebijakan inovatif dapat membimbing kami dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan maju.

Lurah Caturharjo
LURAH
CATURHARJO
N. WASPANTO, S.Si



DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	2
	Daftar isi	3
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	4
	B. Dasar Hukum	5-6
	C. Tujuan Penyusunan Laporan	6-7
	D. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7-8
	E. Strategi dan Kebijakan	8-9
BAB II	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN	
	A. Peraturan Perundang-undangan	10
	B. Gambaran Umum Geografis Kalurahan Caturharjo.....	10-12
	C. Program Kerja Kalurahan Caturharjo Tahun 2023	
	a. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	12-15
	b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	15-18
	c. Capaian Realisasi Kegiatan	18-34
	d. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh..	35-36
BAB III	PENUTUP.....	37
LAMPIRAN		
1.	Rincian Kegiatan Kaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Caturharjo tahun 2022.....	39-43
2.	Data Lurah dan Pamong Kalurahan Caturharjo.....	43-46
3.	Data Anggota Bamuskal Caturharjo Periode 2018-2024	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah kalurahan diharuskan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kalurahan dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Kalurahan Caturharjo menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Caturharjo dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Bupati Bantul melalui Kapanewon Pandak.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPKal) Akhir Tahun 2023 merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Kalurahan selama periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal).

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20940);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman Pemerintahan Kalurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan;

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Standarisasi harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
16. Peraturan Desa Caturharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Caturharjo Berdasarkan Hak Asal-Usul dan kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa 4 Tahun 2019);
14. Peraturan Desa Caturharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tunjangan Purna Tugas Lurah Desa, Pamong Desa dan Anggota BPD;
15. Peraturan Desa Caturharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Caturharjo;
16. Peraturan Desa Caturharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Caturharjo;
17. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan tahun Anggran 2023;
20. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2023.

C. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Tahun mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar kalurahan memiliki dokumen LPPKal akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.

- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Bupati setiap akhir tahun.

D. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Caturharjo

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan Caturharjo dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPMKal, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

1. Visi Kalurahan

Terwujudnya masyarakat Caturharjo yang sehat, tertib, sejahtera, cerdas, berbudaya dan berakhlak mulia.

2. Misi Kalurahan

1. Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat kalurahan Caturharjo.

2. Meningkatkan ketertiban dan kepatuhan seluruh warga dan perangkat Kalurahan Caturharjo terhadap perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan kesejahteraan warga Kalurahan Caturharjo dengan optimalisasi sentra ekonomi kreatif dan perintisan desa wisata.
4. Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan warga kalurahan Caturharjo.
5. Melestarikan adat, tradisi dan budaya masyarakat kalurahan Caturharjo.
6. Meningkatkan iman dan taqwa warga kalurahan Caturharjo.

E. Strategi dan Kebijakan

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Kalurahan Caturharjo selalu diawali dengan Musyawarah Kalurahan yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Kalurahan, Bamuskal dan Lembaga Kalurahan dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di kalurahan dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kalurahan Caturharjo juga rutin mengadakan kegiatan sarasehan bersama warga masyarakat. Dimana dalam kegiatan tersebut, masyarakat bebas memberikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan maupun pembangunan kalurahan. Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak adalah program pembangunan partisipatif yang mana dalam pelaksanaan pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, masyarakat dilibatkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Disamping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain

dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Kalurahan menerapkan sistim pemerintahan terbuka atau *Open Government* yang mana semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan kalurahan, dan pengelolaan keuangan kalurahan melalui berbagai media yang telah di sediakan.

Selanjutnya program dan kebijakan Pemerintah Kalurahan yang menjadi fenomenal adalah Program Berbasis Lingkungan yang mana seluruh warga dan ketua RT ikut berpartisipasi langsung dalam musyawarah untuk perencanaan pembangunan di masing-masing RT dan Pemerintah Kalurahan sebagai fasilitator administrasi dan penyediaan anggaran melalui APBKal dengan model pelaksanaan swakelola menggunakan partisipasi swadaya masyarakat di lingkungan tersebut.

Dari kebijakan yang tertulis diatas, Pemerintah Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (*Trust*) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan suasana terbuka.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan kalurahan diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan kalurahan juga mengacu kepada Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 - 2026 dan Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2023.

A. Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah Peraturan Kalurahan yang dibuat selama tahun 2023 sebanyak 8 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPKal ini.
2. Jumlah Peraturan Lurah yang dibuat selama tahun 2023 sebanyak 7 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPKal ini.
3. Jumlah Keputusan Lurah yang dibuat selama tahun 2023 sebanyak 51 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPKal ini.

B. Gambaran Umum Geografis Kalurahan**1. Kondisi Geografis Kalurahan Caturharjo**

Wilayah Kalurahan Caturharjo merupakan salah satu kalurahan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah utara | : Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Triharjo |
| Sebelah Timur | : Kapanewon Bambanglipuro |
| Sebelah Selatan | : Kapanewon Sanden |
| Sebelah Barat | : Kapanewon Srandakan |

Orbitrasi :

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 5 km
- 2) Jarak dari Ibukota Kabupaten : 11 km
- 3) Jarak adari Ibukota Pemda DIY : 21 km

2. Gambaran Umum Demografis Kalurahan Caturharjo

a. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Caturharjo terdiri dari :

- 1) Tanah Pekarangan : 294.3210 Ha
- 2) Tanah Tegalan : 36.0780 Ha
- 3) Tanah Sawah : 197.3980 Ha
- 4) Sultan Ground (SG) : 7.5375 Ha
- 5) Untuk Bangunan
 - a. Perkantoran : 24.3450 Ha
 - b. Pasar/Toko : 0.6150 Ha
 - c. Tempat Ibadah : 0.2720 Ha
 - d. Kuburan : 2.8704 Ha
 - e. Jumlah Padukuhan : 14 Padukuhan

b. Kependudukan

Jumlah Penduduk

- Jumlah Jiwa : 12283 Jiwa
- Laki-laki : 6122 Jiwa
- Perempuan : 6161 Jiwa
- Jumlah KK : 3793 KK

c. Manajemen Pemerintahan

- Lurah : 1 Orang
- Carik : 1 Orang
- Kepala Seksi (Kasi) : 3 Orang
- Kepala Urusan (Kaur) : 3 Orang

- Kepala Dusun : 14 Orang
- Staf Kalurahan : 1 Orang
- Staf Honorarium : 6 Orang
- Jaga Balai Kalurahan : 1 Orang
- Jumlah Anggota Bamuskal : 7 Orang
- Jumlah Anggota LPMKal : 22 Orang
- Murenbang Kalurahan : 1 Kali

d. Keamanan dan Ketertiban

- Jumlah Anggota Linmas : 94 Orang
- Kegiatan Pembinaan : 1 Kali
- Jumlah Poskamling : 77 Unit
- Jumlah Kejadian Kriminal : -
- Jumlah Bencana Alam : -
- Jumlah Operasi Penertiban : -
- Jumlah Kecelakaan Remaja : -

e. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan

- RT : 77 RT
- TP PKK Kalurahan : 1
- Karang Taruna Kalurahan : 1
- Posyandu : 14
- LPMKal : 1

C. PROGRAM KERJA KALURAHAN CATURHARJO TAHUN 2023

a. Program dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Caturharjo Tahun 2023

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

- 1.1 Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah
- 1.2 Penghasilan tetap dan tunjangan Pamong Kalurahan
- 1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan pamong Kalurahan
- 1.4 Penyediaan operasional Pemerintahan Kalurahan

- 1.5 Penyediaan tunjangan Bamuskal
- 1.6 Penyediaan operasional Bamuskal
- 1.7 Penyediaan operasional RT
- 1.8 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Bamuskal
- 1.9 Tunjangan Kinerja bagi Lurah dan Pamong
- 1.10 Penyediaan Tunjangan HR bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
- 1.11 Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan pamong Kalurahan
- 1.12 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan
- 1.13 Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan
- 1.14 Penyusunan/ Pendataan/ pemuakhiran Profil Kalurahan
- 1.15 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan
- 1.16 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara partisipatif
- 1.17 Penyusunan Musyawarah Kalurahan lainnya
- 1.18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/ RKPKal)
- 1.19 Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ)
- 1.20 Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi /Penilaian Aset Kalurahan
- 1.21 Penyusunan Kebijakan Desa (Penyusunan Perkal selain Perencanaan /keuangan)
- 1.22 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPKal dan Informasi kepada masyarakat
- 1.23 Pengembangan Sistem Informasi Desa
- 1.24 Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
- 1.25 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, pemilihan Ka.Kewilayahan & Bamuskal
- 1.26 Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan& Pengiriman Kontingen dalam Lomdes
- 1.27 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 1.28 Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

- 2.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA
- 2.2 Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD lainnya)
- 2.3 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
- 2.4 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Klas Bumil, Lansia dll)
- 2.5 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang kesehatan
- 2.6 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana
- 2.7 Penanganan/ Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting
- 2.8 Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
- 2.9 Pembangunan jalan Kalurahan
- 2.10 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
- 2.11 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan dll)
- 2.12 Pembangunan Area Bermain Anak untuk mendukung Kalurahan layak Anak
- 2.13 Pembangunan RTLH
- 2.14 Pembangunan MCK
- 2.15 Pengelolaan Rumah Pilah sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan
- 2.16 Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan
- 2.17 Pengembangan pariwisata tingkat Kalurahan

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 3.1 Penyelenggaraan pos keamanan Kalurahan/ piket malam
- 3.2 Penguatan dan peningkatan kapasitas linmas
- 3.3 Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat (Jaga warga)
- 3.5 Persiapan kesiapsiagaan /tanggap bencana skala local Kalurahan (FPRB)
- 3.6 Penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum

- 3.7 Penguatan Desa Aman Covid-19 / tangguh bencana
- 3.8 Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan
- 3.9 Penyelenggaraan festival kesenian, adat / kebudayaan dan keagamaan
- 3.10 Pembinaan bidang keagamaan
- 3.11 Pembangunan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga
(Pembangunan GOR)
- 3.12 Pembinaan Karang Taruna
- 3.13 Pembinaan LKM Kalurahan
- 3.14 Pembinaan PKK

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 4.1. Penguatan ketahanan pangan tingkat Kalurahan
- 4.2. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan
- 4.3. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

5. Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Kalurahan

- 5.1 Penanggulangan Bencana
- 5.2 Penanganan Keadaan Darurat
- 5.3 Penanganan Keadaan Mendesak / Bantuan Langsung Tunai (BLT)

6. Pembiayaan

- 6.1. Penerimaan Pembiayaan
- 6.2. Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal).

b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan

Dalam pengelolaan keuangan kalurahan, Pemerintah Kalurahan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (*Open Government*).

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan lebih terarah maka Pemerintah

Kalurahan Caturharjo telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBKal sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku.

1. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, maka Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal menetapkan ***Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023***. Dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2023 sejumlah **Rp 4.221.943.350** terdiri dari:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	141.198.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	4.628.558.007,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	73.350.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	4.843.106.007,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp	2.017.181.721,94
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp	1.494.625.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp	1.004.332.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	478.287.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	226.878.253,16
Jumlah Belanja	Rp	5.221.304.875,10
Surplus/Defisit	Rp	(378.198.868,10)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	398.198.868,10
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

2. Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBKal

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Kalurahan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam **Peraturan Kalurahan Nomor ... Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDKal Tahun 2023**, sekaligus dilampirkan Laporan Kekayaan Milik Kalurahan (LKMKal) dan Program Sektor dan Program Daerah yang Masuk ke Kalurahan dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul terdiri atas :

U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	141.198.000,00	108.207.700,00	32.990.300,00
Pendapatan Transfer	4.628.558.007,00	4.811.475.280,00	182.917.273,00
Dana Desa	1.996.879.000,00	1.996.879.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	243.964.007,00	276.070.200,00	32.106.193,00
Alokasi Dana Desa	1.332.715.000,00	1.333.526.080,00	(811.080,00)
Bantuan Keuangan Propinsi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	880.000.000,00	1.030.000.000,00	150.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	73.350.000,00	76.729.576,00	3.379.576,00
JUMLAH PENDAPATAN	4.843.106.007,00	4.996.412.556,00	153.306.549,00
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.017.181.721,94	1.792.171.264,00	225.010.457,94
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.494.625.400,00	1.391.785.950,00	102.839.450,00
Bidang Pembinaan			

Kemasyarakatan	1.004.332.000,00	929.248.600,00	75.083.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	478.287.500,00	404.639.000,00	73.648.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	226.878.253,16	201.600.000,00	25.278.253,16
JUMLAH BELANJA	5.221.304.875,10	4.719.444.814,00	501.860.061,10
SURPLUS / (DEFISIT)	(378.198.868,10)	276.967.742,00	(655.166.610,10)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	398.198.868,10	398.198.868,10	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	0,00	655.166.610,10	(655.166.610,10)

c. Capaian Realisasi Kegiatan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

1.1. Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah.

Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Lurah ini dilaksanakan setiap bulan dan dibayarkan secara non tunai yang meliputi penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Lurah. Kegiatan ini terrealisasi 100 % ini sudah sesuai data dari Lurah. Karena penganggaran dibulatkan keatas.

1.2. Penghasilan tetap dan tunjangan Pamong Kalurahan.

Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Pamong Kalurahan (kasi, kaur, dukuh) ini dilaksanakan setiap bulan dan dibayarkan secara non tunai yang meliputi penghasilan tetap, tunjangan jabatan, tunjangan suami /istri, tunjangan anak. Dari kegiatan tersebut terrealisasi 99,64 % dari anggaran. Hal ini sdh sesuai dengan data Pamong yang ada.

- 1.3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.
Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan meliputi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Kegiatan ini terealisasi 22,77 % dari anggaran.
Hal ini disebabkan masih ada beberapa Pamong yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Penyediaan Operasional Pemerintahan Kalurahan.
- 1.4. Operasional perkantoran meliputi kegiatan belanja perlengkapan perkantoran a.l. belanja ATK, peralatan listrik, pembayaran rekening listrik, alat rumah tangga, BBM, Cetak foto copy, keperluan makan minum sehari-hari, SPPD. Dimana realisasi pembelanjaan dilakukan tiap bulan, juga sesuai kebutuhan.
Penghasilan tetap, tunjangan Staf Kalurahan (tunjangan istri, anak dilaksanakan tiap bulan dengan dibayarkan secara non tunai. Honor Staf HR dibayarkan setiap bulan dilaksanakan akhir bulan dengan sistem pembayaran tunai.
Pemberian Honor PPKK (Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan, honor PK, honor Bendahara, honor User dilaksanakan tiap triwulan sekali. Sehingga kegiatan operasional perkantoran terrealisasi 86,34 %. Dari anggaran yang disediakan.
- 1.5. Penyediaan Tunjangan Bamuskal.
Kegiatan ini dilaksanakan tiap awal bulan dengan cara tunai. Kegiatan ini terrealisasi 96,58 % dari anggaran Rp. 93.780.000,- Hal ini disebabkan ada salah satu anggota Bamuskal pada bln September mengundurkan diri, bulan Nopember dan Desember tidak menerima Tunjangan Kinerja.
- 1.6. Penyediaan Operasional Bamuskal.
Untuk menunjang kelancaran tupoksi Bamuskal disediakan operasional meliputi belanja ATK, foto copy dilaksanakan sesuai kebutuhan kapan waktunya menyesuaikan kebutuhan tersebut. Belanja makan minum kegiatan ini dibelanjakan setiap ada rapat Bamuskal, Sidang penetapan Perkal / pembahasan perkal, pertemuan lainnya sesuai kebutuhan. Juga muskal yang dilaksanakan oleh

Bamuskal. Kegiatan ini terrealisasi 43,82 % dari anggaran, hal ini karena dilaksanakan sesuai kebutuhan.

1.7. Penyediaan Operasional RT.

Meliputi operasional pertemuan RT se kalurahan Caturharjo yang dilaksanakan 2 x dlm setahun, dan tunjangan kinerja RT se- Kal. Caturharjo yang diberikan tiap tiga bulan sekali. Kegiatan ini terrealisasi 99,11 % karena untuk kegiatan pertemuan RT ada bebarap personil RT yang tidak dapat hadir, tetapi untuk tunjangan kinerja RT terrealisasi 99,11 %.

1.8. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Bamuskal.

Jaminan Bamuskal meliputi jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan tetapi kegiatan ini tidak terealisasi karena anggota Bamuskal yang dianggarkan belum mendaftar sebagai anggota.

1.9. Tunjangan kinerja bagi Lurah dan Pamong

Tunjangan kinerja dihitung berdasarkan jumlah kehadiran, perhari Rp.4.000, untuk Dukuh dihitung berdasarkan akumulasi jumlah jam kehadiran selama 1 bln (76 jam).

Tunjangan kinerja dibayarkan 3 bln sekali. Tunjangan kinerja ini terrealisasi 73,72 % dari anggaran karena ada beberapa yang tidak sesuai dengan akumulasi jam kehadiran.

1.10. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal.

Kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali dibulan puasa utk menyongsong HR Idul Fitri, dibayarkan secara non tunai. Terrealisasi 99,25 % .

1.11. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan pamong Kalurahan.

Tunjangan Purna Tugas ini merupakan tunjangan purna Kaur Tata Laksana Ibu Ngatinah. Merupakan pembayaran tahap kedua. Terrealisasi 100 % sesuai penganggaran.

1.12. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan.

Kegiatan ini meliputi pencatatan barang/ aset yang dibeli dalam tahun

berjalan. Setiap barang yang dibeli yang tidak habis pakai dicatat dalam buku barang. Pengelola barang menerima honor tiap triwulan sekali.

Pada kegiatan ini dianggarkan belanja 1 unit computer, printer dan proyektor terrealisasi. Sedangkan anggaran untuk belanja sound system tidak terrealisasi karena anggaran yang digunakan bersumber dari PAD, sedangkan masukan PAD kalurahan berkurang, sehingga prosentase realisasi 56,89 % dari anggaran.

1.13. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan.

Pemeliharaan perkantoran meliputi perbaikan computer, sound sytem, genset, sedangkan pemeliharaan perkantoran meliputi rehap ruang pelayanan, pengecatan Mushola, perbaikan dapur tempat cuci piring. Dari anggaran yang disediakan terrealisasi 82,51 %. Anggaran digunakan sesuai kebutuhan.

1.14. Penyusunan/ Pendataan/ pemutakhiran Profil kalurahan.

Kegiatan pemutakhiran data ini dilaksanakan tiap semester, honor pendata dibayarkan di akhir tahun. Kegiatan ini terrealisasi 21,62 % sesuai dengan kebutuhan. Penginputan profil dilakukan secara online dengan aplikasi PRODESTE dilakukan oleh admin profil.

1.15. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan.

Kegiatan yang dilaksanakan a.l belanja ATK, honor petugas arsip yang dibayarkan tiap tri wulan sekali. Anggaran ini terrealisasi 54,96 % karena kebutuhan barang ATK dibelanjakan sesuai kebutuhan.

1.16. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu muskal Updating PBI, dilanjutkan verifikasi data PBI oleh kader, pengentri data oleh petugas. Honor pengentri data dibayarkan tiap triwulan, sedangkan verifikasi data PBI dibayarkan di akhir tahun. Dari anggaran yang disediakan terrealisasi 31,32 %.

1.17. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya (Musdus, Rembug kalurahan.

Kegiatan ini yang dilaksanakan meliputi muskal RKPKal 2024, Musrenbangkal RKPKal 2024, Muskal lainnya antara lain Muskal

penetapan KPM BLT DD, Muskal Bumkal. Dari anggaran yang disediakan terrealisasi 38,79 % hal ini dikarenakan anggaran untuk muskal perubahan RPKKal tidak dilaksanakan, juga peserta yang diundang untuk muskal sesuai kebutuhan.

- 1.18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/ RPKKal)
Pada kegiatan ini yang dilaksanakan yaitu penyusunan RPKKal 2024 meliputi fasilitasi proses Penyusunan RPKKal TA 2024 oleh Panitia 11 yang meliputi belanja makan minum, foto copy, juga honor penyusun dan verifikasi RPKKal. Sedangkan penyusunan RPJMKal tdk terlaksana karena Kalurahan Caturharjo telah dilaksanakan thn 2021. Sehingga anggaran terrealisasi 95,1 %.
- 1.19. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ)
Kegiatan penyusunan Perkal APBKal 2024 dilaksanakan menjelang akhir tahun 2023, sedangkan perubahan reguler APBKal 2023 dilaksanakan bulan September- Oktober 2023. Untuk LPJ APBKal dilaksanakan akhir Februari 2023. Anggaran yang terrealisasi 48,39 % hal dikarenakan ada beberapa musyawarah yang tidak menggunakan anggaran ini dalam arti digabungkan dengan kegiatan lainnya.
- 1.20. Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset
Pengelolaan aset merupakan kegiatan rutin tahunan, walaupun dalam penggunaan dana tidak terrealisasi kegiatan ini tetap dilaksanakan, sedangkan honor pengelola aset masuk dalam operasional perkantoran.
- 1.21. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal lainnya selain Perencanaan / Keuangan).
Pemerintah Kalurahan Caturharjo juga menyusun Perkal selain perencanaan / keuangan a.l. Perkal PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Perkal Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penyusunan perkal tersebut tidak menggunakan anggaran sehingga realisasi 0 %, hal ini dikarenakan dalam penyusunan perkal tersebut penggunaan

anggaran digabung dengan kegiatan lainnya yang kebetulan dilaksanakan bersama.

- 1.22. Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPKal dan Informasi kepada masyarakat.

Kegiatan pembuatan LPPKal dilaksanakan bulan Februari, Maret 2023, meliputi rapat penyusunan, disertai honor tim pembuat LPPKal. Adapun penggunaan dana terrealisasi sejumlah 33,25 %.

- 1.23. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan

Operasional kegiatan PPID ini terrealisasi sejumlah 84,25 %. Penggunaan adana untuk honor tim pelaksanaan kegiatan, sedangkan untuk pertemuan / rapat bergabung dengan kegiatan lain seperti rakor, sehingga bisa menekan pengeluaran.

- 1.24. Koordinasi / kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Rakor yang dilaksanakan menggunakan anggaran ini meliputi rakor umum dan rakor pembangunan. Adapun anggaran yang terrealisasi 584,26%.

- 1.25. Dukungan Dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades Pengisian Bamuskal.

Proses pengisian Bamuskal pada bln Agustus s/d Oktober 2023.

Kegiatan dimulai dengan ditetapkannya wilayah pemilihan, untk kal. Caturharjo ada 6 wilayah pemilihan + 1 keterwakilan perempuan. Juga ditetapkannya panitia pengisian Bamuskal dengan jumlah 9 orang, tertuang dalam SK Lurah Caturharjo Nomor 39 th 2023. Tahapn pengisian dimulai dari sosialisasi pengisian Bamuskal, pendaftaran calon anggota Bamuskal, penelitian berkas admisnistrasi, pengumuman calon anggota Bamuskal yang memenuhi syarat administrasi, pelaksanaan pemilihan keterwakilan perempuan, pelaksanaan pemilihan keterwakilan wilayah pedukuhan, dan penetapan calon anggota Bamuskal terpilih.

Adapun yang calon yang lulus seleksi administrasi ada 18 orang. Untuk musyawarah pemilihan calon anggota Bamuskal keterwakilan perempuan dilaksanakan tgl 27 September 2023 dengan calon anggota Bamuskal Ibu Jariyah dari Samparan. Musyawarah pemilihan

berdasar keterwakilan wilayah dilaksanakan tgl 3-5 Oktober 2023 dengan calon anggota Bamuskal Suranto, Rahmad Syaifudin, Ahmad Wardi, Rokhmiyanto, Arif Agusta Sundioko, Ari Wahyuti.

Tahapan penyelenggaraan pengisian Anggota Bamuskal secara umum berjalan lancar, minat masyarakat cukup baik untuk ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan, juga partisipasi dalam musyawarah pemilihan cukup baik. Dari seluruh tahapan kegiatan pengisian Anggota Bamuskal menggunakan dana ADD dengan prosentase realisasi 76,45 % dari anggaran yang disiapkan, hal ini anggaran yang digunakan sesuai kebutuhan.

1.26. Penyelenggaraan Lomba Kalurahan.

Tahun 2023 kalurahan Caturharjo mendapat giliran Lomba kalurahan. Pelaksanaan Lomba kalurahan bulan Maret 2023. Kegiatan meliputi rapat, pembenahan administrasi juga penambahan kelengkapan data dinding. Lomba kalurahan pelaksanaannya 2 tahap dengan tahap penilaian administrasi yang dilakukan di Pemda manding dengan menghadirkan buku-buku arsip administrasi pemerintahan kalurahan beserta penanggungjawab kegiatan. Dari hasil penilaian lomba kalurahan Caturharjo termasuk 6 besar se Kabupaten Bantul. Sehingga harus dilaksanakan penilaian lapangan, artinya penilaian terjun ke lokasi kalurahan. Alhamdulillah Kalurahan Caturharjo mendapat juara 2 se-Kabupaten Bantul. Realisasi penggunaan anggaran sebesar 84,02 %.

1.27. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kegiatan meliputi rakor, sosialisasi PBB, juga diadakan posko pembayaran PBB yang dilaksanakan di masing-masing pedukuhan bergilir selama 5 bulan. Juga diadakan publikasi menggunakan mobil. Pembayaran PBB tanah lungguh, tanah kas, tanah pengareng-areng mendapat keringanan, tanah kas mendapat keringanan pembayaran pajak sebesar 50 % dari besaran pembayaran SPPT dan pembayarannya dengan anggaran kalurahan. Sedangkan pajak tanah lungguh, pengareng-areng mendapatkan keringanan 65 % dari besaran

pembayaran pajak di SPPT Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar 85,85 % dari anggaran yang disediakan.

1.28. Pengelolaan Tanah Kas Desa.

Penggunaan anggaran ini terrealisasi sebesar 77,53 % dari anggaran yang disediakan. Anggaran digunakan untuk pengelolaan sewa tanah kas, lungguh. Tim bertugas menangani sewa-sewa tanah tersebut.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

2.1. Terselenggaranya PAUD/TKA/TPA.

Realisasi dalam anggaran ini yaitu dukungan pelatihan Guru PAUD(TK) dan gebyar PAUD dan TK sekalurahan Caturharjo yang diadakan di GOR Kal. Caturharjo dengan kegiatan lomba mewarnai. Kegiatan peningkatan TPA melalui pertemuan pengurus dan diberikan subsidi konsumsi kegiatan TPA di 14 dusun dan pemberian buku Iqro' dan Al Qur'an. Persentase realisasi kegiatan ini sebesar 80,05 %.

2.2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana Paud Lainnya)

Dukungan meliputi pemberian PMT untuk PAUD/TK se-Kalurahan Caturharjo sejumlah 19 sekolah, dengan nominal PMT Rp 5.000 per-anak diberikan dalam bentuk makanan. Pengelolaan pemberian makanan oleh masing-masing sekolah. PMT menggunakan DD.

Kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD lainnya menggunakan dana PPBMP a.n. untuk pelatihan guru PAUD, TK juga pembelian APE, pembelian sarana prasarana sekolah lainnya seperti pembelian laptop, printer, almari, spiker aktif, proyektor dll. Dari tiap sekolah berbeda-beda pembeliannya tergantung kebutuhan sekolah masing-masing. Realisasi anggaran dengan persentase sebesar 99,77%.

2.3. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin / berprestasi.

Kegiatan meliputi operasional pertemuan siswa miskin, fakir miskin duaafa dengan diberikan pengarahan, tauziah. Diawal semesteran siswa-siswa tersebut diberikan alat-alat sekolah. Prosentase penggunaan anggaran sebesar 93,46 %.

- 2.4. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Klas Bumil, Lansia dll).
- Penyelenggaraan Posyandu dengan memberikan PMT bagi balita dan lansia se-Caturharjo yang diberikan setiap bulan dengan pencairan dana PMT tiap triwulan sekali. Nominal PMT untuk balita sebesar Rp 5.000,- sedangkan lansia Rp 3.000,-.
- Disini juga diberikan dukungan untuk Lomba Posyandu tingkat kabupaten dan propinsi, yang diajukan lomba Posyandu Asih Lestari, Alhamdulillah mendapat juara I baik tingkat kabupaten maupun propinsi. Persentase realisasi anggaran kegiatan sebesar 99,59%.
- 2.5. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang kesehatan
- Kegiatan ini meliputi penyuluhan pembinaan kader PPKBD, penyuluhan kader balita lansia, penyuluhan kesehatan ibu hamil, penyuluhan Pola asuh dan konseling gizi (MP-ASI). Pertemuan PPKBD dilaksanakan tiap bulan dengan menghadirkan PLKB Kapanewon Pandak. Pertemuan kader balita lansia diadakan tiap triwulan. Penyuluhan kesehatan ibu hamil dan kader balita lansia dengan narasumber dari Puskesmas Pandak II. Anggaran tersebut dibelanjakan untuk operasional makan minum kegiatan, petugas kader juga diberikan honor. Juga dikeluarkan reward bagi pengguna MOW. Realisasi anggaran kegiatan sebesar 78,43 % dari total anggaran yang diberikan.
- 2.6. Pengadaan Sarana & Prasarana Posyandu (PPBMP)
- Pengadaan sarana & prasarana posyandu di 14 pedukuhan meliputi belanja laptop, proyektor, layar, printer, meja kursi posyandu, spiker aktif, etalase kaca, almari, timbangan, juga diadakan kegiatan yang menyangkut kesehatan seperti sosialisasi stunting. Realisasi anggaran sebesar 100%.
- 2.7. Pembinaan Kampung KB.
- Anggaran tidak dapat terealisasi dikarenakan kegiatan di kampung KB dibiayai dari anggaran PLKB Kapanewon Pandak.

- 2.8. Penanganan/ Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting.
Kegiatan yang tercantum dan menggunakan anggaran tersebut yaitu pertemuan kader konvergensi stunting yang dilaksanakan tiap bulan sekali. Dengan honor petugas stunting diberikan tiap triwulan sekali. Sedangkan rembug stunting dilaksanakan setiap setahun sekali. Selain itu pemberian PMT pemulihan balita KEP. Realisasi anggaran sebesar 50,08 % dari total anggaran.
- 2.9. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN).
Pemerintah Kalurahan Caturharjo mengadakan kegiatan pemantauan PSN setiap sebulan sekali dengan melibatkan tim dari Kapanewon, Pamong, dan kader dari dusun yang dilakukan secara bergilir. Tim mengambil sample pengamatan jentik 30 rumah tiap dusun. Operasional digunakan untuk konsumsi petugas. Honor petugas jumantik diberikan kepada kader jumantik RT diberikan setiap ada kegiatan PSN. Selain kegiatan tersebut diadakan kegiatan senam bersama masyarakat Kalurahan Caturharjo setiap satu bulan sekali yang dipandu oleh instruktur senam. Realisasi anggaran sebesar 46,59% dari anggaran.
- 2.10. Pembangunan pengerasan jalan kalurahan (BKK)
Kegiatan ini meliputi pembangunan corblok di 2 padukuhan yaitu Tegalsempu dengan 4 lokasi dan padukuhan Tunjungan (1 Lokasi) yang meliputi belanja material, upah tenaga kerja, dan honor TPK. Realisasi sebesar 100%.
- 2.11. Pembangunan Talud (BKK)
Pembangunan Talud di dusun Piringan RT 10 Gumulan. Anggaran digunakan untuk belanja material dan upah pekerja. Realisasi anggaran sebesar 100%.
- 2.12. Pembangunan Area Bermain Anak untuk mendukung Kalurahan Layak Anak.
Penggunaan anggaran untuk belanja sarana KLA a.l. belanja permainan anak-anak, prosotan, bandulan dll. Juga untuk pembuatan gazebo di lingkup balai kalurahan. Anggaran terrealisasi sebesar 81,63% dari anggaran yang disediakan.

2.13. Pembangunan RTLH

Pembangunan RTLH menggunakan anggaran dari sumber dana DD, dengan jumlah 7 unit dengan penerima manfaat yaitu Marjiyem (Banyuurip Rt 02), Murdi Raharjo / Tumijo (Bogem RT 03), Paijan (Kuroboyo), Sarijem (Tegallayang 10 Rt 04), Wahyu Musrifah (Tegallayang 10 RT 04), Ngatinah (Kuroboyo RT 01), dan Najib Sunu L. (Tegallayang 10 RT 04). Anggaran tersebut digunakan untuk belanja material dan honor TPK. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%.

2.14. Pembangunan MCK.

Pembangunan MCK dari dana DD ini yaitu pembangunan MCK di 6 titik yaitu Pajem (Krapakan RT 03), Suseto (Kuroboyo RT 06), Suratin (Gluntung Lor Rt 01), Jumakir (Banyuurip Rt 04), Jumiran (Gumulan RT 05), dan Jumiran (Gumulan RT 05). Belanja meliputi belanja modal yang berujud material yang dibutuhkan untuk pembangunan MCK dan honor TPK. Realisasi anggaran sebesar 100%.

2.15. Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank sampah Milik Kalurahan.

Kegiatan meliputi dukungan pemilahan sampah kalurahan di Rumah Kumpul Sampah di Kuroboyo, disini ada biaya petugas pemilah sampah dan perbaikan RKS.

Juga diadakan Sosialisasi pengelolaan sampah di tingkat pedukuhan, kegiatan 5000 jogangan dimana tiap dusun perkeluarga dimohon buat jogangan minimal 1 buah sebagai pembuangan sampah organik, sebagai penunjang ada subsidi untuk belanja makan pembuatan jogangan. Setelah adanya gerakan 5000 jogangan tersebut, tidak lupa diadakan evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut kegiatan tersebut. Adapun penggunaan dana yang terrealisasi sejumlah 79,81 %

2.16. Pelatihan Pengelolaan Sampah (PPBMP)

Penggunaan dana digunakan untuk belanja penunjang pengelolaan sampah a.l. bak sampah / tempat sampah, pengadaan RKS, pengadaan kendaraan roda 3 juga pelatihan pengelolaan sampah. Dari sarana prasarana tersebut tiap dusun berbeda sesuai dengan kebutuhan. Anggaran yang digunakan bersala dari sumber dana

PPBMP dan terrealisasi 100 %.

2.17. Penyelenggaraan Informasi Publik Umum.

Penggunaan anggaran ini untuk belanja pembuatan banner / baleho. Persentase realisasi anggaran sebesar 17,4 %.

2.18. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

Anggaran tersebut diatas digunakan untuk operasional kegiatan Tuponan, rapat pengurus, dan studi tiwu di Magetan. Sumber dana berasal dari DD, PAD dengan anggaran yang terrealisasi sebesar 84,67%.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan/ Piket Malam

Kegiatan penyelenggaraan pos keamanan dilaksanakan setiap malam, dengan jadwal 2 orang yang meliputi kegiatan piket malam oleh pamong secara bergantian sesuai dengan jadwal. Dalam realisasi di kegiatan ini yang hadir lebih 2 orang. Untuk menunjang keamanan juga difasilitasi sarana CCTV. Kegiatan ini terealisasi sebesar 94,64 % dari anggaran yang disediakan.

3.2. Penguatan dan Peningkatan Tenaga Keamanan / Fasilitasi kegiatan Linmas kalurahan.

Kegiatan Linmas meliputi pertemuan rutin, belanja honor PAM kegiatan hari besar, juga PAM kegiatan Pokdarwis. Prosentase realisasi kegiatan sebesar 89,88% dari total anggaran.

3.3. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (Pembinaan Kegiatan Forum Jaga Warga)

Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan anggaran kalurahan yaitu pertemuan rutin, belanja seragam Forum Jaga warga. Disamping itu juga ada pelatihan kapasitas Jagawarga. Kegiatan terlaksana sesuai anggaran dengan persentase 77,66%.

3.4. Penyuluhan terhadap Perempuan dan Anak

Diadakan penyuluhan di bidang hukum tentang penyuluhan terhadap perempuan dan anak, penggunaan dana untuk belanja makan, narasumber dan honor harian peserta. Penggunaan dana sebesar

73,14 % dari anggaran yang disediakan.

3.5. Penguatan dan peningkatan kapasitas FPRB

Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran ini yaitu pertemuan rutin, kegiatan peningkatan kapasitas FPRB meliputi belanja konsumsi, honor harian peserta dan honor narasumber. Pelatihan dilaksanakan sekali dalam setahun. Kegiatan ini terealisasi sebesar 48,77% dari total anggaran.

3.6. Pelaksanaan kegiatan dari penguatan desa aman Covid-19.

Pada kegiatan ini anggaran yang terrealisasi sejumlah 4,44 %. Adapun penggunaan dana untuk koordinasi menyangkut perkembangan covid.

3.7. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu kirap peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul pada bulan Juli dengan menggunakan pakaian daerah. Semua pamong ikut kegiatan pawai tersebut.

Adapun anggaran yang terrealisasi sebesar 62,03 %.

3.8. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan

(HUT RI).

Kegiatan ini berupa upacara 17 Agustus 2023 yang dilaksanakan oleh pamong dan staf di Lapangan Triharjo, Pandak. Untuk hari Jadi Kabupaten dilaksanakan dengan mengikuti upacara di Lapangan Trirenggo. Sedangkan peringatan hari Jadi Kalurahan dilaksanakan bulan April, dimana kegiatan dijadikan satu dengan kegiatan Caturharjo Fair thn 2023. Sedangkan Operasional Kegiatan Peringatan HJ Keistimewaan Yogyakarta diadakan tgl 30 Agustus, dengan kegiatan menampilkan pagelaran wayang kulit dengan dalang lokal. Juga ditampilkan beberapa ingkung, dimana tiap pedukuhan menampilkan ingkung. Sedangkan peringatan Hari Ibu dilaksanakan tetapi tidak menggunakan dana ini. Realisasi kegiatan sebesar 81,42 % dari jumlah anggaran yang ditentukan.

3.9. Pembangunan Panggung Seni Budaya

Pembangunan ini bersumber dari Danais, merupakan padat karya tunai yang melibatkan beberapa warga. Pembangunan panggung seni budaya terletak di lapangan Alun-alun Caturharjo bagian barat (timur gedung SMP N 2 Pandak) dengan posisi panggung menghadap ke timur. Penggunaan dana digunakan untuk belanja material, upah tenaga kerja, iuran BPJS ketenagakerjaan, operasional TPK.

Anggaran yang terrealisasi 100 % dari anggaran yang disiapkan.

3.10. Pembinaan Bidang Keagamaan (Pembinaan Kaum Rois)

Bentuk kegiatan dari pembinaan Bidang Keagamaan yaitu pertemuan rutin kaum rois dengan tujuan selain untuk silaturahmi, juga diadakan pengajian, dengan mengundang narasumber dari KUA Pandak. Selain itu, anggaran digunakan untuk subsidi lomba STQ Kapanewon Pandak. Kaum Rois juga diberikan alat untuk beribadah, yang diberikan menjelang Puasa/ HR Idul Fitri. Total presentase realisasi sebesar 76,73 % dari total anggaran.

3.11. Pembinaan Kelompok Olah Raga

Bentuk kegiatan di bidang ini meliputi belanja perlengkapan OR yaitu catur, bola voly, bulu tangkis. Realisasi belanja sebesar 89,09 %.

3.12. Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga (Pembangunan GOR)

Kegiatan ini berupa pembangunan GOR kalurahan lanjutan yang meliputi pembangunan plesteran dinding GOR, acian dinding GOR, lantai GOR, pemasangan instalasi listrik GOR, pemasangan pintu sliding, pembangunan kuncungan GOR, penataan lapangan sepak bola Bogem dan pembuatan garis lapangan badminton dan bola volly. Anggaran yang digunakan untuk belanja material, oprasional TPK, PBJ, upah tenaga kerja. Sebagian besar dana yang digunakan menggunakan dana DD, yang silpa DD 2022 digunakan untuk belanja sebagian material kuncungan GOR. Realisasi kegiatan sebesar 99,79 % dari total anggaran.

3.13. Pembinaan Karang Taruna

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pertemuan rutin anggota

karangtaruna, juga ada oprasional penyuluhan pernikahan dini yang dilaksanakan di Pendopo Kalurahan Caturharjo yang dihadiri Lurah dan Kasi Ulu-ulu sebagai pembina. Presentase realisasi kegiatan sebesar 60,89 %.

3.14. Pembinaan LPM Kalurahan

Bentuk kegiatan dari anggaran ini yaitu pertemuan rutin LPM Kalurahan. Total persentase sebesar 17% dari total anggaran yang ada karena pelaksanaan pertemuan hanya dilakukan beberapa kali.

3.15. Pembinaan PKK

Kegiatan pembinaan PKK dilaksanakan selama 12 bulan dari bulan Januari-Desember 2023 yang meliputi pertemuan rutin PKK, Lomba GN Aksa yang dilaksanakan di Pendopo Pemda II Bantul (Manding) diwakili oleh sebagian anggota PKK dengan materi parenting pola asuh anak dan remaja. Untuk kegiatan sosialisasi tanggap dan tangguh bencana pesertanya juga ibu-ibu pkk. Juga diadakan pelatihan peduli lingkungan, dengan kegiatan pelatihan pemanfaatan sampah keluarga. Dengan narasumber dari UAD Yogyakarta, dengan tema membuat bunga dari sampah keluarga. Untuk belanja SPPD bagi anggota PKK juga dianggarkan. Sedangkan pembinaan adminisreasi PKK Dusun dan Dasa Wisma ini diadakan dengan narasumber dari PKK Kabupaten dan pesertanya PKK pedukuhan. Diadakan latihan administrasi dengan pengisian data. Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan pembinaan PKK ini adalah anggota PKK Kalurahan Caturharjo. Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai optimalisasi peran PKK di wilayah Kalurahan Caturhajro. Jumlah realisasi kegiatan PKK sebesar 67,33 % dari anggaran yang disediakan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan

Kegiatan ini meliputi kegiatan angkat walet, gejluk, rehab gorong-gorong, pelaksanaan BBGR. Persentase realisasi kegiatan sebanyak 87,50% dari total anggaran yang diadakan.

Kegiatan angkat wallet melibatkan 9 Poktan yang ada di Kalurahan Caturharjo meliputi Samparan Maju, Rukun (Tegallayang), Tri Manunggal (Korowelang- Kuroboyo), Trisula Muda (Krapakan), Tani Harjo (Tegalsempu), Tani Manunggal (Gumulan – Tunjungan), Anggoro Kasih (Gluntung Kidul), Subur (Gluntung Lor) dan Akur (Bogem-Glagahan).

Dalam anggaran ini dilaksanakan rehap irigasi di Gluntung Lor RT 2 dgn 2 lokasi, rehap irigasi Dusun Tunjungan RT 7-9, rehap irigasi Gedongan Tunjungan, pengadaan gejalik menggunakan silpa DD 2022, sedangkan normalisasi saluran irigasi Bulak Putat menggunakan DD murni 2023.

Untuk gerakan gemar makan ikan, diadakan sosialisasi tentang pentingnya gemar makan ikan dilanjutkan dengan pelatihan budidaya lele. Pesertanya ibu-ibu PKK, tiap dusun mengirimkan 2 anggota PKK dusun, dengan tujuan supaya peserta pelatihan bias menularkan ke PKK dusun lainnya. Dari tiap kelompok / perdusun disubsidi benih lele beserta kolam terpal juga subsidi pakan 3zak/ dusun. Disini perkembangan budidaya lele tersebut tetap terpantau sampai sekarang. Tiap panen tiap kelompok wajib lapor berapa jumlah hasil panennya. Hasil panen dijual, uangnya nanti digunakan untuk budidaya periode berikutnya, sisanya bias untuk kas kelompok tersebut.

Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk operasional kegiatan P3A kalurahan Caturharjo, antara lain untuk pertemuan P3A dengan agenda musyawarah. Dari beberapa kegiatan tersebut anggaran yang digunakan sebesar 87,50 % dari anggaran yang disediakan.

Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian.

Penggunaan dana untuk belanja alat pencacah sampah organik jumlah 1 buah untuk pembuatan pupuk kompos.

4.2. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pameran UMKM dlm acara Bantul Expo. Acara berlangsung di Gabusan. Caturharjo mengirimkan UMKM Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa.

Realisasi Penggunaan anggaran 100 %.

4.3. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pameran UMKM dlm acara Bantul Expo. Acara berlangsung di Gabusan. Caturharjo mengirimkan UMKM tas rajut, kerajinan pandan, sandal trendi, tas canvas, olahan-olahan makanan minuman seperti minuman jahe, permen jahe dll. Dalam pameran tersebut peserta difasilitasi tempat, makan, transpot juga disubsidi modal walaupun sedikit.

Penggunaan anggaran sebesar 46,66 % dari anggaran yang disediakan.

5. Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Kalurahan

5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Realisasi penggunaan anggaran 0 % karena tidak ada kegiatan penanggulangan bencana yang bersifat darurat dan cukup diatasi dengan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dianggarkan.

5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat

Realisasi penggunaan anggaran 0 %, karena tidak ada kegiatan penanggulangan keadaan yang bersifat darurat dan cukup diatasi dengan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dianggarkan.

Untuk mengeluarkan anggaran penaggulangan keadaan darurat, dibutuhkan prasarat tertentu yang harus lewat SK Bupati.

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak

Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Anggaran untuk BLT di Kalurahan Caturharjo TA. 2023 disalurkan setiap bulan selama 12 bulan dengan sasaran sejumlah 56 KPM. Nilai anggaran BLT sebesar Rp 201.600.000,- dan terealisasi 100%.

6. Pembiayaan

6.1 Penerimaan Pembiayaan

Silpa tahun sebelumnya sejumlah Rp 398.198.868,10,- . terdiri dari berbagai sumber baik PAD, ADD, DD, PBH. Untuk silpa DD digunakan untuk belanja material pembangunan kuncungan GOR, pengadaan

gejlik 10 unit, rehap irigasi di Dusun Gluntung Lor RT 2 (2 tempat), rehap irigasi di Dusun Tunjungan, rekap irigasi di Gedongan Tunjungan. Realisasi penggunaan anggaran 100%.

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Penggunaan anggaran tersebut untuk penyertaan modal BUMKAL Catur Sejahtera sejumlah Rp 20 juta sehingga realisasi penggunaan dana 100%.

d. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Kalurahan Kalurahan tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya masalah pembangunan dan SDM, baik SDM Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kalurahan, maupun warga Kalurahan Caturharjo secara umum.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama tahun 2023 antara lain:

1. Pesatnya perkembangan peraturan perundang-undangan, utamanya yang bersifat multitafsir, akan menghambat percepatan terwujudnya pelaksanaan roda pemerintahan kalurahan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Kalurahan selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah Kapanewon maupun Pemerintah Kabupaten.

2. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) akan berpengaruh pada penerapan prinsip kehati-hatian yang berlebihan yang berdampak pada produktifitas kinerja aparat penyelenggara pemerintahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kalurahan melakukan pembinaan dan rapat-rapat koordinasi serta memberikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan.

3. Masalah pembangunan juga masih memerlukan penanganan serius, terutama pada kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan. Di mana dana yang ada masih jauh lebih kecil dari besarnya usulan warga pada Musrenbang Kalurahan, sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu tempat dengan tempat yang lain.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh Pemerintah Kalurahan adalah mencari bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

BAB III

PENUTUP

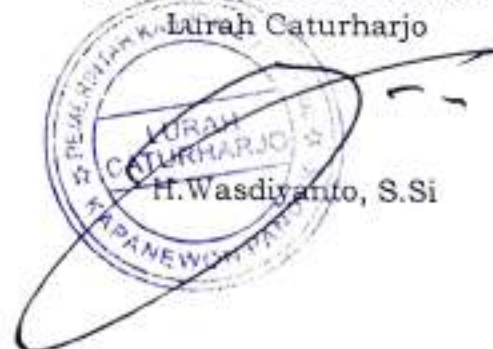
Demikian penjelasan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Tahun 2023. Pada intinya, Pemerintah Kalurahan Caturharjo sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan kalurahan dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan kalurahan masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Kalurahan Caturharjo menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kapanewon, dan masyarakat Kalurahan Caturharjo tentunya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah kalurahan, lembaga kalurahan dan terkhusus kepada Bamuskal atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LPPKal ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Bupati Bantul.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pembangunan Kalurahan Caturharjo dapat berjalan lancar, aman dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aamiin.

Caturharjo, 22 Maret 2024

Lurah Caturharjo



H. Wasdiyanto, S.Si



LAMPIRAN